

TAJUK RENCANA

Biaya Ibadah Haji

BIAYA ibadah haji 2021 diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Begitu statemen Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dr Anggito Abimanyu sebagaimana dilansir di berbagai media, Rabu (7/4). Hal tersebut diungkapkan berdasar hasil Focus Group Discussion (FGD). Kenaikannya sekitar Rp 9.100.000 perjemaah. Artinya, kalau setiap calon haji tahun 2020 lalu dikenakan biaya Rp 35.200.000 (untuk mereka yang berangkat melalui embarkasi Adisumarmo Solo), maka tahun 2021 ini diprediksi menjadi Rp 44.300.000. Namun harus diingat, itu baru prediksi, bukan keputusan. Sedangkan mempunyai kewenangan menetapkan besaran biaya haji adalah DPR yang kemudian dilanjutkan dengan turunnya Keputusan Presiden (Kepres). Saat ini, DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII bersama pemerintah (Kemenag RI), sedang membahas masalah biaya haji. Sebagaimana diungkapkan Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, pihaknya masih memperjuangkan adanya efisiensi. Diharapkan biaya haji bisa berkurang dari angka Rp 44,3 perjemaah (KR, Kamis 8/4).

Menyimak statemen wakil rakyat ini, diprediksi biaya haji tetap akan mengalami kenaikan, tetapi tidak sampai Rp 9,1 juta perjemaah. Karena itu, para calon haji, khususnya yang diproyeksikan bisa berangkat tahun ini, tidak ada salahnya kalau sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kenaikan biaya haji, sehingga saat tiba waktu pelunasan mereka sudah siap dengan dana yang harus dibayarkan.

Mungkin masyarakat, khususnya para calon haji, perlu memahami, bahwa biaya hai Rp 35,2 juta itu bukan biaya penyelenggaraan

ibadah haji (BPIH) secara keseluruhan. Itu hanya *direct cost* yang terdiri biaya penerbangan secara carter pesawat (sekitar Rp 29 juta), sebagian kecil akomodasi di Makkah dan *living cost* yang diberikan kepada jemaah sebesar SAR 1.500/orang, atau lebih kurang Rp 5.568.000). Biaya yang mesti dibayarkan setiap jemaah ini biasa disebut Bipih atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

Sedang biaya *indirect cost* antara lain *maslahat ʿammah* (*general service fee* di Armina), konsumsi; angkutan darat; operasional; perbekalan; pembinaan, penyuluhan dan pelatihan; sewa hotel/pemondokan, pemeliharaan; dan beban lainnya, mencapai berjumlah Rp 34.764.454. Artinya, total biaya haji (BPIH) sebenarnya mencapai Rp 70.000.050/jemaah. Dengan demikian setiap jemaah mendapat subsidi yang diambilkan dari nilai manfaat uang setoran haji hasil pengelolaan dana oleh BPKH, sebesar hampir 50% dari biaya yang mestinya menjadi tanggungannya.

Untuk biaya haji 2021, saat ini masih dibahas di DPR RI. Kita belum tahu sisi mana yang akan dipangkas untuk efisiensi. Namun selain peningkatan efisiensi, mungkin perlu dipertimbangkan adanya penambahan subsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Sedangkan untuk biaya prokes (konon Rp 6,6 juta) bisa disubsidi dari APBN, khususnya dari anggaran penanganan covid-19. Dengan begitu, kenaikannya tidak terlalu membebani jemaah.

Kita tunggu saja hasil pembahasan di Panja Haji Komisi VIII DPR RI. Semoga hasilnya sesuai harapan para calon haji. Tak kalah penting, semoga pemerintah Arab Saudi segera memberi kepastian soal pelaksanaan ibadah haji 2021. □

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah hampir dua minggu, melaksanakan pendataan keluarga. Kali ini, BKKBN mencoba memotret detail perihal keluarga di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga. Dalam siaran resminya, BKKBN menyebutkan bila Pendataan Keluarga 2021 ini nantinya akan menghasilkan data mikro keluarga secara *by name by address*, penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan.

Upaya memotret keluarga Indonesia dengan data mikro ini memang memiliki banyak tujuan. Selain pendataan keluarga ini juga bisa digunakan untuk mendiagnosa kemiskinan, ketertinggalan pembangunan hingga keluarga berkualitas dengan kondisi yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya. Semua ini merupakan bagian data penting dan menentukan ketika BKKBN mengambil kebijakan-kebijakan. Bahkan dalam pendataan ini juga akan dimasukkan indikator stunting. Sehingga akan terpetakan keluarga dengan risiko tinggi stunting.

Target

Tentu harus diakui, hal ini tidak lepas dari tugas tidak ringan yang disangga BKKBN, saat ini. Sebab dalam Rakornas Kemitraan Program Bangsa Kencana akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo sudah menekankan bila BKKBN memegang kendali atas pencegahan stunting di tanah air. Meski sudah mengalami penurunan angka kasus dibanding 5 tahun silam, stunting atau gagal tumbuh anak masih cukup tinggi angkanya.

Lima tahun silam, angka stunting di Indonesia berada di 37% dan sudah turun menjadi 27,6% di tahun 2019. Dalam rakornas, Presiden mengingatkan target penurunan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Menurut Presiden sebagaimana dikutip Antara (28/1), bukan angka mudah. “Tapi saya meyakini kalau di lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini

Fadmi Sustiwi

bukan angka yang sulit,” jelas Presiden. Keprihatinan mendalam Presiden Jokowi tidak lepas dari pemahaman bila bayi yang sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif. Hal ini harus tidak terbiarkan. Segala daya perlu di-



KR-JOKO SANTOSO

lakukan untuk mencegah agar bisa optimal mencapai Indonesia Maju.

Perhatian itu bukan tanda dasar. Adalah pernyataan Bank Dunia yang dikemukakan Menko PMK Muhadjir Effendi (Antara, 25/1) yang menyebut angka stunting angkatan kerja di Indonesia — angkatan kerja saat ini, yang masa bayinya atau masih dalam kandungan dan mengalami stunting — jumlahnya mencapai 54%. Atau bisa dikatakan, 54% angkatan kerja sekarang adalah mantan atau penyintas stunting.

Edukasi

Dari sisi kesehatan, stunting jelas akibat gizi terutama gizi ibu hamil dan menyusui, menjadi sebab pertama. Banyaknya mitos mengenai ibu hamil dan makanan, menjadi salah satu fak-

tor. Kemudian baru dilihat asupan hingga 1.000 hari pertama seorang anak. Jika hal ini yang dilihat, ‘dengan mudah’ kemudian akan dikatakan bila stunting erat kaitannya dengan kemiskinan.

Pandangan itu tidak salah namun juga tidak benar 100%. Bisa jadi penyebabnya justru non-kesehatan atau tidak terkait 100% dengan kesehatan, walau akan menyinggung masalah gizi. Sangat mungkin terjadi, kasus stunting erat kaitan dengan perilaku – terutama perilaku makan – masyarakat. Sehingga pendidikan atau edukasi untuk warga menjadi sangat mutlak dilakukan.

Pendidikan untuk memberi pemahaman warga untuk sadar sehat, sadar gizi serta mengubah perilaku warga terutama saat hamil – menyusui, menjadi kunci. Posyandu yang sudah rutin dilaksanakan di masyarakat dengan penimbangan balita, pengukuran kepala dan tinggi badan serta kemudian memberi tambahan makanan bergizi, perlu ditambah edukasi.

Pendidikan termasuk lewat posyandu memegang kunci perubahan perilaku dan edukasi sedini mungkin menghindari stunting. Dan pendataan keluarga kali ini diharapkan bisa dibaca pemetaan stunting-nya. Dari peta ini diharap akan membuka realita untuk analisa dan antisipasi penanganannya. □

) **Fadmi Sustiwi, jurnalis Kedaulatan Rakyat pemerhati masalah perempuan - anak*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Mengawal ‘SMK Pusat Keunggulan’

VISI Presiden Jokowi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia hingga mampu bersaing di tingkat dunia diterjemahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melalui dirilisnya ‘Merdeka Belajar’ episode ke-8. Di dalam episode kali ini, pendidikan vokasi menjadi fokus perhatian lewat program ‘SMK Pusat Keunggulan’ (SMK PK). Program ini sekaligus sebagai jawaban dan menyempurnakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, dimana didalamnya menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Merdeka belajar episode ke-8 yang difokuskan pada program SMK PK menjadi angin segar bagi sekolah karena akan menambah daya tarik pendidikan vokasi, dikalangan siswa lulusan SMP/MTs. Harapan ke depan nantinya SMK menjadi pilihan utama dan pertama mereka ketika akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi dengan program SMK PK akan ada peningkatan *hard skills*, *soft skills* dan juga kompetensi siswa, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan industri, serta dunia kerja.

Langkah Utama

Tidaklah mudah mengimplementasikan seperti apa dan harus bagaimana program SMK PK ini. Program akankah secara terus menerus dijalankan di sekolah, ataupun sebatas program yang akan berhenti ketika tidak dijadikan prioritas lagi? Beberapa persoalan yang sering ditemui di lapangan adalah seluruh komponen sekolah belum satu pemikiran mengenai SMK PK. Atau hambatan utama tidak tergeraknya guru dan bahkan kepala sekolah untuk melakukan perubahan signifikan. Karena merasa sudah

Rudy Prakanto

mapan dan nyaman.

Padahal secara nyata permasalahan pendidikan vokasi di SMK sejak dulu masih berputar pada persoalan sama : lulusannya kurang kompetitif dan sulit mencari pekerjaan. Sehingga seluruh komponen di SMK, baik itu kepala sekolah, guru, karyawan dan bahkan komite sekolahnya harus memiliki keberanian melakukan perubahan mendasar. Agar sekolahnya tetap diperhitungkan masyarakat, dan dunia industri.

Program SMK PK yang telah diluncurkan Kemendikbud seharusnya ditangkap sebagai peluang dan kesempatan baik untuk mengangkat sekolah. Karena program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang terampil di dunia kerja atau mampu menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Memang secara riil program mengharuskan sekolah untuk mendaftarkan dan mengajukan diri. Sehingga bila nanti terpilih dalam program SMK PK diharapkan menjadi rujukan serta melakukan pengimbasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya.

Wirausaha

Profil SMK yang profesional dan bermutu ditandai dengan kompetensi, sikap konsisten, konsekuen, komitmen, kompetitif dan berkarakter. Seluruh SMK di Indonesia, baik yang terpilih menjadi SMK PK ataupun tidak, harus menyiapkan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja, siap membuka lapangan kerja, dan

siap meneruskan belajar ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang menghendakinya.

Diperlukan usaha keras dan sinergi yang kuat untuk menjadikan lulusan SMK itu sesuai dengan dunia usaha dan industri, sampai pada tataran menjadi wirausaha kreatif. Bahkan tidak menutup kemungkinan SMK pun dapat menjadi media mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Pengembangan pembelajaran kewirausahaan di SMK harus terus diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis melalui beberapa pendekatan. Di antaranya *teaching factory*, *techno park*, *business center* di sekolah. Dan ini semua tidak terbatas dijalankan di SMK PK tersebut. Tidak perlu diragukan lagi pendidikan di SMK jawaban peningkatan SDM Indonesia. □

) **Rudy Prakanto, Ketua Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI dan Kepala Balai Dikmen Kulonprogo*

Pojok KR

Jika tidak dilarang, 81 Juta orang bakal mudik.

-- Siap-siap saja silaturahmi secara virtual.

PSS melenggang ke perempatfinal Piala Menpora

-- Laskar Sembada memang harus *sembodo*.

19 April, DIY uji coba pembelajaran tatap muka.

-- Masih ada waktu untuk persiapan.

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenah. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’ Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarish, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.